

**OPTIMALISASI PENGONTROLAN PEMBEBANAN BIAYA PROVISI TAHUNAN  
KREDIT MODAL KERJA MULTI GUNA (KMK-MG) DI BANK NAGARI  
CABANG SIMPANG EMPAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen  
Perdagangan (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Ahli Madya*



Oleh :

MAYANG SARI

58035/2010

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERDAGANGAN III  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

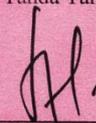
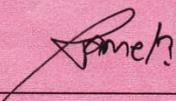
**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**OPTIMALISASI PENGONTROLAN PEMBEBANAN BIAYA PROVISI  
TAHUNAN KREDIT MODAL KERJA MULTI GUNA (KMK-MG)  
DI BANK NAGARI CABANG SIMPANG EMPAT**

Nama : Mayang Sari  
NIM / BP : 58045 / 2010  
Program Studi : Manajemen Perdagangan (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Manajemen Perdagangan (DIII) Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

Padang, agustus 2013

Tim Penguji		Tanda Tangan
Nama		
1. Erni Masdupi, Ph.D	(Ketua)	
2. Rosyeni Rasyid, SE, ME	(Anggota)	
3. Ramel Yanuarta, RE, SE, MSM	(Anggota)	

## ABSTRAK

**Mayang Sari : Optimalisasi Pengontrolan Pembebanan Biaya Provisi Tahunan Kredit Modal Kerja Multi Guna (KMK-MG) Di Bank Nagari Cabang Simpang Empat.**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti optimalisasi pengontrolan pembebanan biaya provisi tahunan kredit modal kerja multi guna (KMK-MG) di Bank Nagari Cabang Simpang Empat. Untuk mengetahui optimalisasi pengontrolan pembebanan biaya provisi tahunan dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pembebanan biaya provisi tahunan kepada nasabah (KMK-MG) telah sesuai dengan standar Bank Nagari.

Metode yang dipakai dalam penelitian tugas akhir ini adalah Metode Observasi. Penulis mengumpulkan data langsung dari perusahaan terkait untuk diolah sehingga akhirnya diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang Optimalisasi Pengontrolan Pembebanan Biaya Provisi Tahunan Kredit Modal Kerja Multi Guna (KMK-MG) Di Bank Nagari Cabang Simpang Empat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pertumbuhan dan perkembangan kredit di Bank Nagari Cabang Simpang Empat semakin meningkat. Proses pembebanan dilakukan terdiri dari empat tahap. Pertama, pembagian nasabah (KMK-MG) berdasarkan bulan peminjaman kredit atau bulan jatuh tempo provisi tahunan. Kedua, pengecekan nasabah yang sudah jatuh tempo dan pembuatan surat pemberitahuan jatuh tempo kepada nasabah. Ketiga, pengecekan rekening afiliasi nasabah pada saat provisi jatuh tempo. Keempat, penagihan biaya provisi kepada nasabah. Pengontrolan akan optimal jika pendapatan yang diterima sudah sesuai dengan target tujuan yang diharapkan dari awal.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Optimalisasi Pengontrolan Pembebanan Biaya Provisi Tahunan Kredit Modal Kerja Multi Guna (KMK-MG) Di Bank Nagari Cabang Simpang Empat”, yang mana merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program Studi Manajemen Perdagangan Diploma III (DIII) pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis belum tentu dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erni Masdupi, SE, M.Si, Ph.D selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Rasa hormat dan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuniawardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Erni Masdupi, SE, M.Si,Ph.D selaku pembimbing dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Ibu Rosyiana Rasyid, SE, ME dan Bapak Ramel Yanuarta,RE, SE, MS.M selaku dosen penguji tugas akhir penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
6. Seluruh karyawan Bank Nagari Cabang Simpang Empat atas kerjasamanya demi kelancaran Tugas Akhir ini.
7. Kedua Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dalam penulisan Tugas Akhir ini.
8. Keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Seterusnya kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penulis demi kelancaran penulisan tugas akhir ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih membutuhkan penyempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis berharap agar tugas akhir ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa serta para pembaca pada umumnya.

Penulis,

Mayang Sari

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Bank .....	7
B. Kredit .....	7
C. Kredit Modal Kerja .....	20
D. Biaya Provisi .....	27
E. Pengontrolan Biaya .....	28
<b>BAB III PENDEKIATAN PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir .....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
C. Rancangan Penelitian .....	30

<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Sejarah Singkat Perusahaan .....	33
B. Penyaluran Kredit KMK-MG dan Ketentuan Biaya Provisi .....	51
C. Adminitrasi Kredit pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat .....	54
D. Proses Pembebanan Biaya Provisi Tahunan KMK-Mg pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat .....	56
E. Optimalisasi Pengontrolan Pembebanan Biaya Provisi Tahunan Kredit Modal Kerja Multi Guna di Bank Nagari Cabang Simpang Empat .....	58
F. Hambatan dalam Optimalisasi Pengontrolan Biaya Provisi Tahunan ....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Perkembangan jumlah Nasabah Penyaluran Kredit KMK-MG pada  
Bank nagari Cabang Simpang empat.....3
2. Perkembangan jumlah Nasabah Penyaluran Kredit KMK-MG pada  
Bank nagari Cabang Simpang empat.....52
3. Ketentuan Biaya Provisi.....53

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1. Logo Bank Nagari ..... 39

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Simpang Empat .....
2. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Provisi Tahunan .....
3. Surat Permohonan Observasi.....
4. Riwayat Hidup.....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Hal tersebut perlu diperhatikan.

Untuk dapat melaksanakan pertumbuhan ekonomi seperti itu, sudah pasti diperlukan dana yang tidak sedikit. Sebagian besar dari dana pembangunan tersebut diperoleh dari fasilitas kredit perbankan. Oleh karena itu, perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada yang membutuhkan dan memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Bank menerima simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, peranan bank tidaklah terlepas dari kegiatannya dalam pengaturan lalu lintas pembayaran dari waktu ke waktu bahkan setiap saat dikala bank itu beroperasi. Dari aktivitas bank tersebut, tersalurkan berbagai produk bank sesuai dengan kebijakan-kebijakan bank yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Salah satu produk dari bank tersebut adalah kredit, dimana sampai saat ini masih merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan yang besar dan memiliki resiko tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dari suatu bank tersebut. Bank Nagari Cabang Simpang Empat merupakan salah satu bank yang sudah banyak menyalurkan kredit kepada masyarakat. Di Bank Nagari Cabang Simpang Empat juga mempunyai berbagai jenis kredit seperti Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Dari beberapa fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Nagari Cabang Simpang Empat, Kredit Modal Kerja Multi guna (KMK-MG) merupakan salah satu kredit yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kredit ini berupa kredit komersial yang diberikan pada 1 (satu) pemohon dalam rangka pembiayaan aktivalancar suatu usaha, seperti pembelian bahan mentah, bahan membantu, piutang dan lain-lain. Perkembangan Kredit modal kerja Multi guna dapat di lihat pada tabel :

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Nasabah dan Penyaluran Kredit  
KMK-MG Pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat  
Tahun 2009-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Kredit yang Disalurkan</b>	<b>Jumlah Nasabah KMK-MG (orang)</b>
2009	Rp.148.581.892.545,00	173
2010	Rp.180.151.425.414,00	195
2011	Rp.224.845.904.816,86	190
2012	Rp. 232.013.952.586.00	196

*Sumber : Bank Nagari Cabang Simpang Empat*

Selama proses penyaluran kredit ini, mulai dari proses pencairan kredit sampai pelunasan kredit, terdapat beberapa biaya yang dibebankan kepada nasabah. Mulai dari pencairan kredit, terdapat biaya provisi, supervisi, administrasi, biaya notaris, dan biaya asuransi yang langsung didebet dari pencairan kredit. Jadi nasabah tidak harus menyediakan uang untuk membayar biaya awal kredit tersebut. Namun ada jenis kredit yang terdapat pembebanan provisi tahunan dan pembebanan perpanjangan asuransi, supervisi yang diperpanjang pada tahun-tahun berikutnya. Untuk pembebanan kredit yang seperti ini tentunya diperlukan suatu bentuk pengontrolan oleh petugas agar tidak ada pendapatan bank yang *lost* dan agunan bank dapat terus terlindungi.

Ada beberapa kewajiban nasabah yang harus dikontrol dan dikelola sendiri oleh petugas tanpa adanya bantuan sistem. Seperti halnya dalam pembebanan biaya provisi pada kredit modal kerja multi guna (KMK-MG) jangka panjang. Biasanya biaya provisi tahunan kredit masih dibebankan (perpanjangan) kepada debitur pada tahun-tahun berikutnya. Selama ini pengontrolan yang dilakukan petugas belum memadai sesuai standar yang ada. Dalam pelaksanaan pengontrolan biaya provisi tersebut, ada kalanya ketika dapat menyimpang dari rencana, maka pengontrolan tersebut sangat diperlukan agar kejadian-kejadian yang menghambat tercapainya tujuan tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik.

Dalam hal ini, petugas harus teliti dan jeli untuk memantau pembebanan biaya provisi kredit-kredit nasabah agar tercapai sasaran, karena hasil selama ini masih belum sesuai dengan rencana awal atau tujuan yang diinginkan. Sehingga perlunya suatu pengontrolan yang optimal dari petugas untuk menghindari kehilangan pendapatan yang juga merupakan kerugian dari bank tersebut.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik mengambil judul tugas akhir **“Optimalisasi Pengontrolan Pembebanan Biaya Provisi Tahunan Kredit Modal Kerja Multi Guna (KMK-MG) Di Bank Nagari Cabang Simpang Empat.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi pengontrolan pembebanan biaya provisi tahunan kepada nasabah KMK-MGdi Bank Nagari Cabang Simpang Empat?
2. Apakah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengontrolan pembebanan biaya provisi tahunan kepada nasabah KMK-MG telah sesuai dengan standar Bank Nagari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem optimalisasi pengontrolan yang dilakukan saat ini dan apakah pengontrolan sudah efektif dilaksanakan pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mewujudkan optimalisasi pengontrolan pembebanan biaya provisi tahunan nasabah KMK-MG pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan pemahaman dan pedoman bagi karyawan serta bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak manajemen Bank Nagari Cabang Simpang Empat dalam optimalisasi

pengontrolan pendapatan Bank khususnya pembebanan provisi tahunan kredit KMK-MG.

2. Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat memberi manfaat bagi siapa saja yang membacanya.
3. Dengan penelitian ini bisa memperdalam, memperluas pengetahuan penulis dan dapat menerapkan teori yang telah diperoleh.
4. Dari penelitian ini di harapkan penulis dapat memenuhi syarat untuk mencapai gelar Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Bank**

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pengertian bank menurut Arthesa dan Handiman (2006:5), adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.”

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Arthesi dan Handiman (2006:5), bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali kemasyarakat.

#### **B. Kredit**

Menurut Ismail (2010:93), Secara etimologi, istilah kredit berasal dari Bahasa latin, yaitu "credere", yang berarti kepercayaan. Dalam hal ini berarti kedua belah pihak saling memberi kepercayaan, dimana pihak Bank merupakan pemberi kepercayaan kepada calon debitur agar kredit yang diberikan tersebut akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan debitur sebagai penerima kredit juga merupakan penerima kepercayaan

sehingga debitur wajib untuk membayar sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang ditetapkan.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. Menurut Budisantoso dan triandaru (2006:113), kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) maupun pinjaman nontunai (*non-cash loan*).

Sehingga kita dapat mengetahui eratnya hubungan antara bank dengan kredit, yang merupakan salah satu aktifitas bank. Suatu bank juga akan terlihat keberhasilannya pada perkreditan yang dijalankannya.

### **1. Unsur-Unsur Kredit**

Pengertian kata-kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2000:74) adalah sebagai berikut :

a Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit.Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau bayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah

seperti bencana alam. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar suatu risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang sengaja maupun risiko yang tidak disengaja

e **Balas Jasa**

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungandalam jumlah tertentu.Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga bagi bank prinsip konvensional.

## **2. Fungsi Kredit**

Pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan badan usaha yang membutuhkan dana. Kredit berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluan dana yang diberikan oleh bank. Menurut Budi Untung (2005:4) yang antara lain fungsi dari kredit adalah :

a **Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa**

Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
- Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dana menjadi *idle*, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- c Kredit yang menciptakan alat pembayaran yang baru
- Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap adanya alat pembayaran yang baru.
- d Kredit sebagai alat pengendali harga
- Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan

kredit, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar pada masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- e Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini, disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan lain-lain. Semua itu akan mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

### **3. Jenis-Jenis Kredit**

Dalam pelaksanaannya, kredit yang disalurkan oleh bank menurut Budi Untung (2005:4) terdiri dari beberapa jenis antara lain :

- a. Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:
  - a) Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi.

Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk

membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

b) Kredit likuiditas

Kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkereditannya.

c) Kredit langsung

Kredit ini diberikan oleh bank Indonesia kepada lembaga pemerintah.

b. Dilihat dari segi tujuannya

a) Kredit konsumtif

Kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai konsumsi sehari-hari.

b) Kredit produktif

Baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap, seperti: peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin. Kredit eksploitasi yaitu kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja yang berupa bahan baku.

c. Dari segi dokumen

Kredit sangat terkait dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai sejumlah uang, dan dokumen tersebut

merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang jarak jauh. Jenis kredit ini terdiri dari:

a) Kredit ekspor

Semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung

b) Kredit impor

d. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, Yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit dikelompokkan menjadi:

a) Kredit kecil

Kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil. Yang termasuk dalam usaha kecil adalah kegiatan usaha dan asetnya diluar tanah dan bangunan yang ditempati, tidak lebih dari Rp. 600 juta. Maksimum kredit yang dapat diberikan adalah Rp. 200 juta.

b) Kredit menengah

Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pengusaha kecil

c) Kredit besar

e. Dilihat dari segi jangka waktu

a) *Short Term Loan* (Kredit Jangka Pendek)

Kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, kredit wesel.

b) *Medium Term Loan*(Kredit Jangka Menengah)

Kredit berjangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun

c) *Long Term loan* (Kredit Jangka Panjang)

Kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka rehabilitasi, ekspansi(perluasan), dan pendirian proyek baru.

f. Dilihat dari segi jaminan

a) Kredit tanpa jaminan

Kredit ini menurut undang-undang perbankan tahun 1992 mungkin saja bisa direalisasikan karena UU perbankan tahun 1992 tidak secara ketat menentukan bahwa pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebaliknya menurut UU pokok-pokok perbankan tahun 1967 yang digantikannya, pemberian kredit tanpa jaminan ini dilarang, sesuai dengan pasal 24 ayat

(1), bahwa bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.

b) Kredit dengan jaminan

Dimana untuk kredit yang diberikan pihak kredit mendapat jaminan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Didalam memberikan kredit, bank menanggung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asa-asa perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut maka diperlukan jaminan. Adapun bentuk jaminannya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

#### **4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat atau nasabah, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit untuk melakukan penilaian kriteria-kriteria agar mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan bank. Prinsip pemberian kredit dikenal dengan prinsip metode 5C dan 7P yang pada dasarnya memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah. Pemberian kredit dengan 5C menurut Kasmir (2002:117) adalah sebagai berikut:

a. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan di berikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur

dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

b. *Capacity*

Adalah analisis yang mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya.

c. *Capital*

Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya. Sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi nasabah, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang

usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian kredit dengan analisa 7P menurut Kasmir (2002:119) adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

b. *Party*

Yaitu mengklafisikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan

pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit akan diperolehnya dari bank.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### C. Kredit Modal Kerja

kredit modal kerja merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk membiayai operasional perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun proses produksi sampai barang tersebut terjual. Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut.

Kredit modal kerja menurut Kasmir (2000:77) adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Sedangkan menurut Ismail (2010:101) merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Dan menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:117) kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah.

Ditinjau dari jangka waktunya, kredit modal kerja menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:117) terdiri atas dua macam, yaitu :

1. Kredit modal kerja *revolving* (KMK-*revolving*)

Apabila kegiatan usaha debitur dapat diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan pihak bank cukup mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka fasilitas KMK nasabah dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru.

2. Kredit modal kerja *einmaleg* (KMK-*einmaleg*)

Apabila volume kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan atau pihak bank kurang mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka pihak bank merasa lebih aman kalau memberikan KMK-*einmaleg*. Fasilitas KMK ini hanya diberikan sebatas satu kali putaran usaha nasabah, dan apabila pada periode selanjutnya nasabah menghendaki KMK lagi maka nasabah harus mengajukan permohonan kredit baru.

Kredit modal kerja multi guna (KMK-MG) termasuk kepada Kredit Modal Kerja *einmaleg*, ditujukan untuk membiayai modal kerja semua sektor ekonomi dengan batasan tidak melanggar atau menyalahi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). KMK-MG merupakan fasilitas yang diberikan bank berupa kredit komersial yang diberikan pada 1 (satu) pemohon dalam rangka pembiayaan aktiva lancar suatu usaha, seperti: pembelian bahan mentah, bahan pembantu, piutang dan lain-lain. Dalam memberikan pinjaman inipun mempunyai aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ketentuan KPB, yaitu sebagai berikut:

## 1. Kriteria Calon Debitur

### a. Perorangan:

- a) Warga Negara Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum (berusia minimum 21 tahun atau telah menikah, berakal sehat
- b) Mempunyai usaha atau objek pembiayaan yang jelas dan dapat diyakini Bank
- c) Tidak tercatat dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia
- d) Tidak sedang menikmati fasilitas kredit dengan kualitas Non Lancar, baik di bank sendiri maupun di bank/lembaga keuangan lain, kecuali apabila dalam rangka restrukturisasi kredit

### b. Badan Usaha/Badan Hukum:

- a) Berbadan hukum Indonesia
- b) Mempunyai anggaran dasar, memenuhi syarat legalitas operasional dan ketentuan yang berlaku tentang badan usaha tersebut
- c) Mempunyai usaha atau objek pembiayaan yang jelas dan dapat diyakini Bank
- d) Badan usaha dan Pengurus tidak tercatat dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia

- e) Badan usaha dan Pengurus tidak sedang menikmati fasilitas kredit dengan kualitas Non Lancar, baik di bank sendiri maupun di bank/lembagakeuangan lain, kecuali apabila dalam rangka restrukturisasi kredit.
- c. Pemerintah:
  - a) Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah,
  - b) Khusus untuk Pemerintah Daerah, permohonan kredit mendapatkan persetujuan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku dan mempedomani Undang-Undang atau Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pinjaman daerah
  - c) Khusus untuk Pemerintah Pusat, legalitas permohonan harus mempedomani Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku
- d. Lainnya: Mempedomani Undang-Undang dan atau Peraturan Pemerintah yang berlaku

Dokumen yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai lampiran dan kelengkapan permohonan kredit adalah sebagai berikut:

1. Perorangan:
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor/SIM Calon debitur, penjamin dan pemilik agunan

- b. Foto Copy izin usaha dan izin tempat usaha dan lainnya yang dimiliki. Untuk debitur usaha informal, cukup berupa Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa/Walinagari/Camat
  - c. Foto Copy NPWP, untuk plafond kredit tertentu yang mempersyaratkannya,
  - d. Laporan keuangan (neraca, Rugi/Laba dan sebagainya). Untuk debitur Informal cukup disajikan secara sederhana berdasarkan hasil wawancara petugas Bank dengan debitur,
  - e. Foto Copy bukti kepemilikan agunan,
  - f. Surat keterangan hubungan keluarga dari instansi yang berwenang bagi agunan yang kepemilikannya bukan atas nama debitur,
  - g. Foto Copy Surat Nikah atau Kartu Keluarga, bagi yang telah menikah,
  - h. Pas Photo calon debitur suami/istri,
  - i. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, penilaian agunan oleh penilai atau konsultan independen, dan lainnya.
2. Badan Usaha/Badan Hukum:
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor/SIM Pengurus, penjamin dan pemilik agunan,
  - b. Foto Copy Anggaran dasar dan seluruh akta perubahan,

- c. Foto Copy izin usaha dan izin tempat usaha dan lainnya yang dimiliki,
  - d. Foto Copy NPWP,
  - e. Laporan keuangan (neraca, Rugi/Laba dan sebagainya),
  - f. Foto Copy bukti kepemilikan agunan,
  - g. Surat keterangan hubungan keluarga dari instansi yang berwenang bagi agunan yang kepemilikannya bukan atas nama calon debitur,
  - h. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, penilaian agunan oleh penilai atau konsultan independen, dan lainnya.
3. Pemerintah:
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor/SIM dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang,
  - b. Surat Persetujuan DPRD, untuk debitur Pemerintah Daerah,
  - c. Foto Copy NPWP Kepala Daerah, untuk debitur Pemerintah Daerah,
  - d. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Lainnya: Mempedomani Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang berlaku

Selama menikmati kredit ini pun, nasabah harus memenuhi ketentuan-ketentuan perkreditan yang telah ditetapkan oleh Bank , aturan tersebut meliputi:

- a. Plafond Kredit
- b. Jangka Waktu Kredit

Dan setelah debitur setuju untuk memenuhi aturan yang berlaku, debitur menandatangani perjanjian kredit dengan petugas. Dalam proses pencairan kredit inipun, debitur berkewajiban untuk membiayai biaya-biaya yang telah ditetapkan Bank, yaitu:

1. Provisi

- a. Provisi dibebankan kepada debitur untuk pertama kalinya pada saatrealisasi yang dihitung dari Plafond, dan untuk tahun berikutnya dihitungdari Baki Debet.
- b. Besaran provisi dan perubahannya mempedomani Surat Direksi yangberlaku.

2. Supervisi *Fee*:

- a. Supervisi *Fee* dibebankan kepada debitur yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- b. Besaran Supervisi *Fee* dan perubahannya mempedomani Surat Direksiyang berlaku.

3. Biaya Administrasi:

- a. Biaya Administrasi dibebankan kepada debitur saat realisasi kredit.

- b. Besaran Biaya Administrasi dan perubahannya mempedomani SuratDireksi yang berlaku.

#### 4. *Fee* Lainnya:

Dalam rangka pemberian kredit sindikasi dan pola pembiayaan lainnya, Bank dapat menerima *feedan* lainnya yang besarnya berdasarkan kesepakatan.

### **D. Biaya Provisi**

Merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank. Sedangkan menurut Sigit (2006:125), provisi adalah biaya penerbitan bank garansi yang harus dibayar oleh pemohon sebelum penerbitan. Menurut Sigit (2006:124) Bank garansi adalah jaminan pembayaran bila pihak yang dijamin melakukan cidera janji. Menurut Besarnya Provisi ditetapkan berdasarkan tujuan penggunaan bank garansi dan ditetapkan berdasarkan persentase, biaya yang dikenakan oleh bank kepada kita sebagai pemohon, biaya ini semacam biaya administrasi tapi bukan merupakan biaya administrasi sebab bank juga meminta biaya administrasi kepada pemohon.

Biasanya biaya ini kira-kira berkisar 0,5 - 1% dari total uang yang pemohon dapatkan dari bank. Provisi ini dibebankan kepada debitur untuk pertama kalinya pada saatrealisasi yang dihitung dari Plafond, dan untuk tahun berikutnya dihitung dari Baki Debet.

## **E. Pengontrolan Biaya**

Dalam sebuah manajemen terdapat sejumlah proses yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, dan tiap-tiap proses tersebut membentuk suatu grup proses. Dalam manajemen proyek terdapat 5 grup proses yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, dan penutup. Salah satu bagian dari grup manajemen proyek yaitu proses pengontrolan.

NirmalaSarii.2012. "Proses Pengontrolan Proyek", Dalam pelaksanaan sesuatu, suatu ketika dapat menyimpang dari rencana, maka pengawasan dan pengontrolan sangat diperlukan agar kejadian-kejadian yang menghambat tercapainya tujuan dapat segera diselesaikan dengan baik. Pengontrolan (*controlling*) adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Pengontrolan juga merupakan pengukuran dan pemantauan perkembangan secara berkala akan tujuan untuk memastikan adanya kecocokan antara progress dengan rencana awal, selain itu untuk memantau setiap penyimpangan yang ada dari rencana awal. Ada 4 macam pengontrolan yaitu pengontrolan biaya, pengontrolan waktu/jadwal, pengontrolan kualitas dan pengontrolan kinerja. Pengawasan dan pengontrolan biaya setidaknya-tidaknya perlu mencakup pengawasan dan pengontrolan:

- a) Jadwal pembiayaan (*cash flow*)
- b) Besarnya keseluruhan biaya

Dalam pekerjaan, pengontrolan biaya dilakukan dengan memeriksa apakah biaya yang sudah dikeluarkan/dihasilkan sesuai dengan kemajuan atau progress prestasi yang telah dicapai. <http://nirmalasarii.blogspot.com/2012/11/proses-pengontrolan-proyek.html> diakses pada tanggal 27 agustus 2013

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Salah satu tugas administrasi kredit adalah melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban nasabah yang akan menjadi pendapatan bagi Bank. Salah satunya mengawasi pembebanan biaya provisi tahunan. Petugas administrasi kredit harus melakukan suatu bentuk pengontrolan yang optimal dalam melakukan pengecekan sampai kepada pembukuan biaya ini agar tidak adanya biaya yang hilang yang juga dapat mengakibatkan kerugian pada Bank. Di Bank Nagari Simpang Empat juga telah melakukan upaya pengontrolan terhadap pembebanan biaya ini, mulai dengan adanya buku kontrol, pemberitahuan kepada nasabah, pendebitan maupun penagihan.

Ketentuan pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat, kredit modal kerja multi guna dan kredit investasi multi guna yang dibebankan biaya provisi tahunan karena jangka waktunya yang panjang dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengoptimalan pengontrolan biaya provisi ini dilakukan dengan cara menganalisa antara pemasukan dengan biaya yang ditargetkan akan di dapatkan, pengoptimalan ini dibantu oleh *ledger*. *Ledger* adalah buku bantu yang di dalamnya terdapat kolom-kolom yang berisi nama nasabah, nomor perjanjian kredit, tanggal pencairan kredit, alamat, nomor

rekening afiliasi, baki kredit, dan jumlah biaya provisi tahunan kredit yang akan dibayarkan yang dibuat secara manual.

Pengontrolan pembebanan biaya provisi tahunan kredit modal kerja multi guna (KMK-MG) Bank Nagari Cabang Simpang Empat dapat dikatakan optimal jika pengontrolan biaya provisi tersebut sudah sesuai pendapatan yang diterima dengan target tujuan yang diharapkan dari awal.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis ajukan dalam penulisan tugas akhir ini, adalah :

1. Dalam melakukan pembebanan ini petugas dituntut untuk lebih teliti dalam melakukan pengecekan terhadap nasabah yang jatuh tempo.
2. Pengontrolan ini sebaiknya dibantu sistem dalam menerbitkan daftar provisi tahunan yang sudah jatuh tempo. Sehingga dapat membantu petugas dan pengontrolan lebih optimal.
3. Melakukan pembukuan dalam membukukan biaya provisi ini, adanya suatu bentuk pembukuan yang tersistem. Sehingga nantinya lebih aman dan dapat tergambar.

## DAFTAR PUSTAKA

TriandaruSigitdanBudisantosoTotok, 2006. "*Bank dan Lembaga Uang Lainnya*",  
PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta

Ismail, 2011. "*Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*", PT Kencana,  
Jakarta

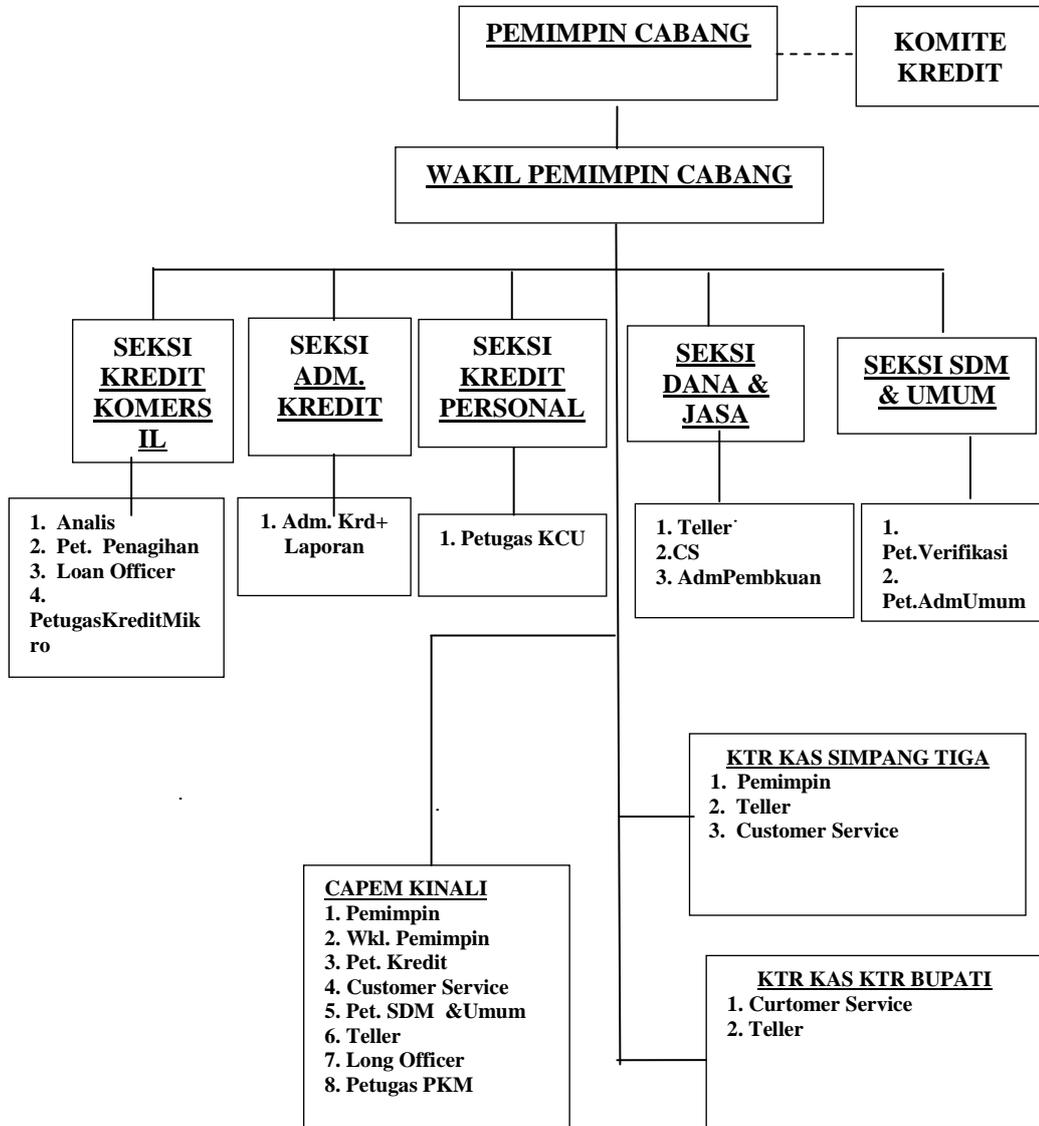
Kasmir, 2000. "*Bank dan Lembaga Bank Lainnya*", PT. Raja GrafindoPersada,  
Jakarta

Untung Budi, 2005. "*Kredit Perbankan di Indonesia*", PT. Andi, Yogyakarta

Arthesa Ade dan Handiman Edia, 2006. "*Bank dan Lembaga Keuangan Bukan  
Bank*", PT. Indeks kelompok Gramedia, Jakarta

<http://nirmalasarii.blogspot.com/2012/11/proses-pengontrolan-proyek.html> diakses  
pada tanggal 27 agustus 2013

## Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Simpang Empat



Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Simpang Empat

Sumber: Agenda Bank Nagari